



Kinerja Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika di Kota Denpasar

Ista Dewa Mahendra ^{a*}, I Dewa Ayu Putri Wirantari ^a, Komang Adi Sastra Wijaya ^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

* Correspondence: istadewa44@gmail.com

Abstract

Social rehabilitation of narcotics users is a complex process that aims to return individuals involved in narcotics use to society in a productive and functional manner. In this effort, various approaches and strategies have been developed, including medical interventions, psychosocial, and community-based approaches. In this case, the Denpasar City National Narcotics Agency has a rehabilitation program designed to prevent increasing levels of narcotics users. The type of research used is Qualitative Descriptive writing. In this research the author uses research indicators proposed by Agus Dwiyanto (2006: 50-51), namely Productivity, Service Quality, Responsiveness, Accountability and Accountability. The results of this research show that the productivity of the Denpasar City National Narcotics Agency in terms of productivity still has not met the targets set. In terms of service quality, the Denpasar City National Narcotics Agency is still not optimal due to the lack of human resources to drive the program. Next is the responsiveness indicator where the Denpasar City National Narcotics Agency has carried out its obligations quite well but still needs to be improved. Responsibility indicators have worked quite well because while running the program, the Denpasar City National Narcotics Agency worked according to the applicable SOPs. Then, the accountability indicators are said to be running well, which is proven by the existence of routine accountability reports

Keywords: Performance, Rehabilitation Of The Denpasar City National Narcotics Agency

Abstrak

Rehabilitasi sosial pengguna narkotika merupakan sebuah proses yang kompleks yang bertujuan untuk mengembalikan individu yang terlibat dalam penggunaan narkotika ke dalam masyarakat secara produktif dan berfungsi. Dalam upaya ini, berbagai pendekatan dan strategi telah dikembangkan, termasuk intervensi medis, psikososial, dan pendekatan berbasis masyarakat. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar memiliki program rehabilitasi yang dirancang untuk melakukan pencegahan pengguna narkotika yang semakin tinggi, adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penulisan Kualitatif Deskriptif. Dalam peneitian ini penulis menggunakan indikator penelitian yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006:50-51), yakni Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ini menunjukkan Produktivitas dari Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam hal produktivitas masih belum memenuhi target yang di ditetapkan. Dalam hal kualitas layanan Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar masih belum juga di katakana optimal karena kurangnya sumber daya manusia sebagai penggerak program, selanjutnya adalah indikator responsivitas yang dimana Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sudah menjalankan kewajiban dengan cukup baik namun masih harus ditingkatkan. Indikator responsibilitas sudah berjalan cukup baik karena selama menjalankan program, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar bekerja sesuai SOP yang berlaku. Kemudian indikator akuntabilitas yang dikatakan sudah berjalan dengan baik yang dimana hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang rutindi buat

Kata Kunci: Kinerja, Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

1. Pendahuluan

Badan Narkotika Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dapat dinilai melalui berbagai indikator, termasuk efektivitas dalam penanganan kasus narkotika, implementasi program pencegahan, keberhasilan rehabilitasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Pertama-tama, dalam penanganan kasus narkotika, keberhasilan Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dapat diukur dari jumlah penangkapan pelaku, pemusnahan barang bukti narkotika, dan efektivitas penindakan hukum. Kerja sama yang baik dengan kepolisian dan sistem peradilan kriminal merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan ini. Selanjutnya, program pencegahan narkotika juga menjadi aspek kritis dari kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Langkah-langkah pencegahan mencakup penyuluhan di sekolah-sekolah, kampanye publik, dan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat umum untuk

meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba. Efektivitas program ini dapat diukur melalui evaluasi dampaknya terhadap pengetahuan dan perilaku masyarakat terkait narkoba.

Dalam konteks rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar memiliki program khusus untuk membantu individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Kinerja keberhasilan rehabilitasi dapat mencakup tingkat pemulihan fisik dan mental, tingkat reintegrasi sosial, serta dukungan keluarga dan masyarakat untuk individu yang telah melewati proses rehabilitasi. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat, juga menjadi indikator penting dari kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Sinergi antara lembaga terkait dapat memperkuat upaya penanggulangan narkoba dan menciptakan dampak yang lebih besar. Penting untuk dicatat bahwa kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sebaiknya didasarkan pada data dan indikator kuantitatif dan kualitatif yang akurat. Sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang memadai juga merupakan faktor penentu kinerja lembaga ini. Seiring berjalannya waktu, perubahan kebijakan, dan dinamika masyarakat, kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dapat mengalami perubahan yang perlu terus dipantau dan dievaluasi.

Program rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Upaya rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar melibatkan tim multidisiplin, termasuk tenaga medis, psikolog, konselor, dan tenaga sosial. Setiap individu yang mengikuti program rehabilitasi akan menjalani evaluasi menyeluruh untuk menentukan pendekatan terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar juga memberikan perhatian khusus pada pendekatan pencegahan kembali kecanduan. Ini mencakup penyuluhan, konseling, dan dukungan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan jangka panjang. Program rehabilitasi ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memfasilitasi reintegrasi sosial bagi individu yang telah menyelesaikan program mereka.

Pada tahun 2020-2023, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar secara rutin mencatat dan menganalisis data mengenai program rehabilitasi narkoba. Data tersebut mencakup jumlah individu yang mengikuti program rehabilitasi, jenis narkoba yang dominan dalam kasus-kasus tersebut, serta tingkat keberhasilan pemulihan. Berikut ini terdapat data Badan Narkotika Kota Denpasar dalam menangani pasien rehabilitasi sosial dari tahun ke tahun:

Tabel 1. Data Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

No	Tahun	Jumlah Pasien	Jenis Kelamin Pasien	Rata-rata	Jenis Narkoba Yang Digunakan	Usia Pasien Rehabilitasi
1.	2020	18	Laki-laki		Sabu dan Inex	18-43
2.	2021	16	Laki-laki		Sabu	21-50
3.	2022	19	Laki-laki dan Perempuan		Sabu	26-52
4.	2023	17	Laki-laki dan Perempuan		Sabu dan Ganja	21-46

Sumber: Data Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Berdasarkan data tersebut terdapat penurunan pasien rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dari tiga tahun terakhir setiap tahun nya. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah pasien yang mengikuti program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar, mencerminkan perubahan dinamika dalam respons terhadap tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Penurunan ini mencakup sejumlah faktor, termasuk kesadaran yang semakin meningkat terhadap dampak negatif penyalahgunaan narkoba, peningkatan upaya pencegahan, serta keberhasilan strategi rehabilitasi yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan data statistik Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar menunjukkan bahwa komposisi jenis kelamin pasien yang mengikuti program rehabilitasi cenderung mencerminkan keragaman, dengan

perbedaan yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan, menandakan bahwa tantangan penyalahgunaan narkoba tidak memandang jenis kelamin. Dengan kata lain, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar mengakui bahwa penyalahgunaan narkoba dapat mempengaruhi individu tanpa memandang apakah mereka laki-laki atau perempuan, dan oleh karena itu, upaya rehabilitasi perlu dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus dari kedua jenis kelamin pasien.

Dalam data tersebut mengungkap bahwa perempuan yang mengikuti program rehabilitasi mungkin memiliki tantangan tambahan, termasuk faktor sosial dan psikologis yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan rehabilitasi yang sensitif terhadap kebutuhan spesifik mereka. Di sisi lain, kehadiran laki-laki dalam program rehabilitasi menunjukkan perlunya memahami dinamika maskulinitas dan faktor-faktor khusus yang mungkin mempengaruhi proses pemulihan mereka.

Dari data yang telah dikumpulkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar, terlihat bahwa usia rata-rata pasien yang mengikuti program rehabilitasi mencerminkan cakupan yang luas, dengan kisaran usia yang melibatkan berbagai tahap kehidupan, mulai dari remaja hingga dewasa. Pemahaman mendalam terhadap usia pasien ini memungkinkan Badan Narkotika Nasional untuk merancang program rehabilitasi yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh kelompok usia yang beragam ini.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa remaja menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan pasien dewasa, termasuk aspek pendidikan, dukungan keluarga, dan perkembangan identitas. Oleh karena itu, program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar telah dirancang untuk memberikan perhatian khusus pada aspek-aspek ini, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pemulihan holistik pada setiap tahap kehidupan. Berikut ini adapun data jumlah pegawai yang mempengaruhi kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk menangani rehabilitasi sosial di Kota Denpasar

Tabel 2. Data Bidang dan Jumlah Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

No	BIDANG	POLRI	ASN	PPNPN
1	Bidang Pelayanan SKHPN	2	3	9
2	Bidang Pelayanan Konsultasi	2	5	12
	Rehabilitasi			
	total	4	8	21

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Berdasarkan data jumlah pegawai tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Denpasar saat ini memiliki permasalahan yang serius disebabkan oleh kekurangan jumlah pegawai, suatu kondisi yang menimbulkan dampak signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional dalam upaya pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba di wilayah tersebut. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia ini merugikan, menghambat pelaksanaan program-program strategis seperti edukasi, pemeriksaan, dan rehabilitasi, yang seharusnya menjadi inti dari upaya pencegahan dan penanganan narkoba.

Permasalahan yang *pertama* yaitu keterbatasan sumber daya manusia telah mempengaruhi optimalisasi kinerja rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar untuk melaksanakan program-program edukasi, pemeriksaan, dan rehabilitasi dengan maksimal, mengakibatkan potensi keterlambatan dalam merespons kasus-kasus penyalahgunaan narkoba serta membatasi kemampuan untuk memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat. Dengan kekurangan pegawai ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar agar dapat lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang kompleks terkait dengan narkoba di tingkat lokal.

Akibatnya, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar menghadapi risiko keterlambatan dalam merespons secara tepat waktu terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dan penanganan rehabilitasi pengguna narkoba seiring dengan keterbatasan kapasitas untuk melakukan tindakan preventif yang lebih proaktif. Dengan kekurangan pegawai yang sangat terlihat, lembaga ini juga menghadapi kesulitan dalam memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat, menciptakan ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, sangatlah penting untuk segera mengatasi kekurangan ini dengan penambahan personil yang memadai, melalui rekrutmen atau pengembangan sumber daya manusia, guna memastikan bahwa Badan

Narkotika Nasional Kota Denpasar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam pelayanan yang kompleks di tingkat lokal. Permasalahan yang *kedua* yaitu keterbatasan anggaran juga mempengaruhi sejumlah aspek kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, termasuk namun tidak terbatas pada pemangkasan dana untuk operasional sehari-hari, pengurangan kapasitas personel, dan keterbatasan dalam mengembangkan atau meningkatkan infrastruktur dan teknologi yang mendukung tugas-tugas lembaga. Hal ini dapat menghambat kemampuan Badan Narkotika Nasional dalam memberikan respon yang cepat dan efektif terhadap dinamika yang terus berkembang dalam peredaran narkotika di wilayahnya.

Pelaksanaan program pencegahan yang luas dan intensif, mengakibatkan keterbatasan sumber daya untuk penyuluhan di sekolah-sekolah, masyarakat umum, dan dalam pengembangan program rehabilitasi. Dampaknya dapat dirasakan pada efektivitas upaya-upaya preventif yang seharusnya menjadi bagian integral dari strategi Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam membentuk kesadaran dan melibatkan masyarakat dalam perang melawan penyalahgunaan narkotika. Dalam memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, lembaga kesehatan, dan pemerintah daerah. Sinergi dan kolaborasi yang optimal seringkali memerlukan alokasi dana yang memadai untuk mendukung pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan implementasi kebijakan bersama guna mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan narkotika. Untuk mengatasi kendala anggaran tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar mungkin perlu melakukan advokasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pusat, guna memastikan bahwa lembaga ini mendapatkan dukungan finansial yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya secara optimal. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga dapat menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam upaya penanggulangan narkotika di tingkat kota.

Permasalahan yang *ketiga* adalah Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan narkotika merupakan masalah serius yang dapat memiliki dampak besar pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa faktor dapat menjelaskan mengapa kesadaran ini kurang, dan penting untuk memahami dinamika kompleks yang terlibat. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang bahaya narkotika. Pendidikan yang kurang efektif atau minim informasi tentang konsekuensi penggunaan narkotika dapat menyebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap risiko yang terlibat. Beberapa orang mungkin tidak menyadari dampak jangka panjang kesehatan mental dan fisik, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari penggunaan narkotika. Penting untuk mengatasi kurangnya kesadaran ini melalui pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan yang efektif, upaya destigmatisasi, liputan media yang seimbang, dan penanganan masalah ekonomi serta ketidaksetaraan sosial. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk berbicara terbuka tentang masalah ini, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih sadar dan proaktif dalam menghadapi tantangan penggunaan narkotika.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif. Penulis mengambil permasalahan perihal Kinerja Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika Di Kota Denpasar. Metode kualitatif ini memberikan data secara lengkap dengan adanya perkembangan masalah dalam situasi sosial. Metode riset deskriptif tertuju dalam penyelesaian permasalahan yang berlangsung di masa kini sebagai kunci pada apa yang telah diriset (Moleong,2014:11). Riset kualitatif deskriptif mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mengakhiri dengan kesimpulan yang berkaitan dengan penganalisaan. Penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang masalah yang akan diteliti dan diamati, tetapi juga dapat menjawab masalah dan mengolah hasil penelitian melalui analisis.

Unit analisis dapat diartikan sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek dalam penelitian. Unit analisis bertujuan untuk menjelaskan dan menegaskan fokus yang akan dikaji dan diteliti agar terhindar bias dan keluar dari fokus utama penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan yaitu berkaitan

dengan *Kinerja* di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Sedangkan unit analisis individu yang ditetapkan yaitu kepala Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dan Pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar, maupun masyarakat Kota Denpasar. Unit analisis yang ditetapkan penulis tersebut dipertimbangkan dengan alasan karena pihak tersebut memiliki pemahaman mengenai permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Teknik penyajian data merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir untuk menggambarkan kesimpulan dari hasil penelitian. Teknik ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dan dianalisis dapat disajikan dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih baik. Pada penelitian ini teknik penyajian data yang digunakan meliputi:

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan "the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat menggunakan berupa grafik, matrik, jenjang kerja, dan chart.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Temuan

Penilaian kinerja sebuah organisasi merupakan suatu kegiatan yang penting dilaksanakan karena dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam melakukan penilaian kinerja diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja sangat diperlukan dalam menilai tingkat ketercapaian sasaran dan tujuan Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar.

Adapun hasil temuan penelitian terkait dengan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi Di Kota Denpasar berdasarkan indikator kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006) adalah sebagai berikut:

Produktivitas

Indikator produktivitas merupakan sikap mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya dan hari selanjutnya. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio input dengan output dimana bersaran input dan output nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana organisasi telah mencapai produktivitas yang maksimal dan tentu saja sejalan dengan tujuannya.

Dalam hal ini produktivitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dapat diketahui dari kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah di tetapkan sebelumnya oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Kemudian, target-target yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika dijelaskan sebagai berikut

Program Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Program rehabilitasi sosial Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar adalah inisiatif yang dirancang untuk memberikan dukungan holistik kepada individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Denpasar, dengan tujuan memungkinkan mereka untuk pulih secara fisik, psikologis, dan sosial. Program ini mencakup serangkaian kegiatan yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial, seperti konseling individual dan kelompok, terapi perilaku kognitif, terapi seni, terapi olahraga, serta pelatihan keterampilan hidup dan kerja. Selain itu, program ini juga menyediakan layanan dukungan sosial yang mencakup bantuan dalam hal perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan dukungan keluarga. Selain itu, program ini juga memfasilitasi integrasi kembali peserta ke dalam masyarakat melalui program rehabilitasi yang dirancang khusus, yang mencakup pembinaan, mentoring, dan dukungan dari komunitas lokal. Hal tersebut langsung di sampaikan oleh Bapak KBP. I Ketut Adnyana Putera, S.Si. selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar.

Tabel 3 Data Sosialisasi Badan Narkoba Nasional Kota Denpasar

No	Tahun	Frekuensi				Sosialisasi
		DENBAR	DENSEL	DENUT	DENTIM	
1	2020	40	57	44	43	Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Remaja
2	2021	56	62	51	57	Sosialisasi Penanggulangan Narkoba Di Masyarakat
3	2022	63	76	58	46	Sosialisasi Peningkatan Peran Ibu Dalam Mencegah Penyalahgunaan narkoba
4	2023	59	46	52	47	Sosialisasi Tentang Jenis-Jenis Narkotika

Sumber: Diolah Penulis

Dari hasil wawancara dan data di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sendiri sudah mengupayakan program-program rehabilitasi dari tahun 2020 sampai 2023 dengan maksimal, dengan melakukan sosialisasi ke banjar-banjar yang setiap harinya mencapai 3 sampai 4 kali yang berlokasi di beberapa kecamatan yang salah satu nya yaitu kecamatan Denpasar Utara Desa Adat Tonja ataupun langsung ke masyarakat melalui Kantor Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar untuk menekan angka pengguna narkotika Di Kota Denpasar.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sendiri sudah mengupayakan program-program rehabilitasi dari hasil pelayanan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika dan rawat inap serta pelayanan gratis rehabilitasi yang belum ada di Bali tersebut di nilai kurang maksimal, dikarenakan masih menggandeng yayasan handaru kasih dan rumah sakit pemerintah

Gambar 1. Yayasan Rehabilitasi Handaru Kasih Bali



Sumber: Diolah Penulis

Kualitas Layanan

Indikator kualitas layanan merupakan salah satu indikator yang penting dalam menilai kinerja suatu organisasi. Baik atau buruknya kualitas layanan muncul dari respon masyarakat yang mendapatkan layanan dari organisasi tersebut. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja suatu organisasi publik.

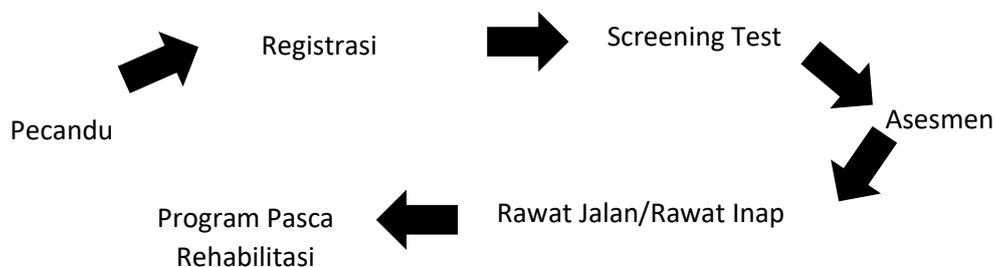
Kualitas layanan dalam hal ini merujuk pada seberapa banyak energi birokrasi yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan publik. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif di dayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa. Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sendiri masih belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan program kerja yaitu yang terutama program rehabilitasi pengguna narkotika yang di pegang oleh bidang rehabilitasi karena jumlah sumber daya manusia yang belum mencukupi.

Melalui pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar kurang memadai karena hanya berjumlah total 34 orang terhitung Pegawai kontrak, ASN/PNS dan Polri.

Selain Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada juga menjadi hal yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam penanganan kasus rehabilitasi pengguna narkotika. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar terus berupaya untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang di butuhkan.

Dari Hasil wawancara, menyatakan bahwa jumlah petugas atau tenaga kerja yang menangani program rehabilitasi di Kota Denpasar belum mencakupi dalam mengerjakan tugasnya. Dalam mengerjakan tugasnya. Dalam pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar seharusnya bisa merekrut kembali tenaga kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat atau pasien rehabilitasi melalui program kerja yang sudah direncanakan. Sedangkan, untuk sarana dan pra sarana yang ada dalam menunjang program kerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar masih dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat ataupun pasien rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar masih belum cukup maksimal.

Gambar 2. Alur Rehabilitasi



Sumber: Diolah Penulis

Responsivitas

Responsivitas adalah kepekaan dan kemampuan organisasi dalam menangkap dan mengenali berbagai kebutuhan masyarakat yang nantinya dituangkan ke dalam agenda dan prioritas program, serta untuk mengembangkan program-program yang telah ada, sehingga program-program tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas juga secara langsung menggambarkan bagaimana kemampuan organisasi dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki tingkat kepekaan yang tinggi ditunjukkan dengan kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam menjalankan tugasnya selain menerima laporan dari pihak berwajib juga menerima laporan langsung dari masyarakat atau pengguna narkotika itu sendiri dan ditangani langsung oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Berdasarkan wawancara Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam menjalankan tugas menangani pasien rehabilitasi pengguna narkotika di Kota Denpasar

sudah cukup baik. Pola komunikasi antar masyarakat juga berjalan dengan baik dalam penanganannya terutama terhadap menangani pasien rehabilitasi seperti contohnya bersosialisasi kepada masyarakat. Responsivitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dapat di katakan cukup baik karena memberi binaan-binaan terhadap pasien rehabilitasi setelah selesai melakukan rehabilitasi

Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan disiplin kerja pegawai dengan mengikuti berbagai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan secara konsisten. Mereka tidak hanya tepat waktu dalam kehadiran, tetapi juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Badan Narkotika Kota Denpasar juga terus meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka melalui berbagai pelatihan dan pengembangan diri, sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di wilayah Denpasar. Disiplin kerja yang ditunjukkan setiap hari mencerminkan integritas dan komitmen mereka terhadap visi dan misi organisasi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Dalam hal ini kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 12 Tahun 2022 mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Adapun pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar pada umumnya mengacu pada prinsip-prinsip administrasi serta kebijakan yang ada seperti yang di atur dalam SOP dengan nomor SOP/43/RH/2022/BNNK. Sehingga nantinya ketika menjalankan program-program pemerintah, semua yang ada di dalamnya dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sudah mengikuti SOP dengan nomor SOP/43/RH/2022/BNNK. Hal ini disebabkan karena dengan adanya SOP ini, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar lebih mudah untuk melaksanakan program-program pembinaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responsibilitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dapat di katakan baik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar suatu kebijakan publik dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan petunjuk pelaksanaan yang menjadi dasar atau pedoman penyelenggaraan suatu pelayanan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban pada periode tertentu.

Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan maupun kegiatan birokrasi publik tersebut konsisten dengan kehendak publik. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi jika kegiatan tersebut dianggap benar sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan di atas, berikut akan di bahas mengenai bentuk pertanggung jawaban yang di laksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar.

Berdasarkan wawancara dapat dikatakan bahwa akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa adanya pertanggungjawaban dari Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dengan cara *home visit* pasca rehabilitasi pengguna narkotika

Akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya laporan bulanan dan evaluasi anggaran dan laporan masyarakat yang di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar terkait pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika Di Kota Denpasar serta dengan adanya transparansi penyaluran dan penggunaan dana dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika Di Kota Denpasar semakin membuktikan bahwa akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sangat baik

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika melalui program rehabilitasi mengacu pada 5 (lima) indikator. Indikator tersebut berdasarkan pendekatan indikator kinerja organisasi menurut Agus Dwiyanto (2006) yaitu indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Produktivitas

Menurut Dwiyanto (2006: 50-51), konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Namun, konsep produktivitas diperluas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Dalam hal ini produktivitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam penanganan rehabilitasi sosial pengguna narkotika di Kota Denpasar dapat diketahui dari kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Target-target yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkotika melalui program rehabilitasi terbukti belum tercapai seluruhnya. Dari tiga target hanya satu target yang tercapai yaitu Program Kerja Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika. Sedangkan target yang belum tercapai yaitu penurunan angka pengguna narkotika di Kota Denpasar serta pelayanan rehabilitasi gratis melalui pelayanan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Hal ini membuktikan bahwa produktivitas kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam penanganan rehabilitasi sosial melalui program rehabilitasi masih belum maksimal. Namun, sampai saat ini Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar terus berupaya untuk memaksimalkan kegiatan pemberantasan dan penanggulangan kasus narkotika yang ada di Kota Denpasar.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan dalam hal ini menunjuk pada seberapa banyak energi birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan pengguna jasa (Dwiyanto, 2006: 69). Sehingga dapat dikaitkan dengan sejauh mana upaya pelayanan yang telah dilakukan oleh birokrasi dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Kota Denpasar.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal, tentu saja perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dalam penelitian yang penulis lakukan, jumlah sumber daya manusia yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar terkait masih kurang, Kurangnya sumber daya manusia tersebut tentunya menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kerja sehingga mengakibatkan kurangnya kualitas layanan yang akan diberikan langsung kepada masyarakat. Karena penggerak program-program yang ada adalah sumber daya manusia itu sendiri.

Peran sosialisasi sebagai media informasi sangatlah penting di sini mengingat dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, maka tingkat kesadaran masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan anak ini meningkat. Dan dalam menjalankan atau melakukan sosialisasi, peran sumber daya manusia baik itu dari dinas maupun dari lembaga masyarakat itu yang utama, namun karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada, hal ini menghambat kegiatan yang ada. Sedangkan, sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang program-program pemerintah sudah lengkap. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam penanganan rehabilitasi sosial pengguna narkotika masih belum optimal. Walaupun memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, jika terdapat kekurangan sumber daya manusia juga menyebabkan kualitas layanan yang diberikan masih kurang optimal.

Responsivitas

Responsivitas adalah kepekaan dan kemampuan organisasi dalam menangkap dan mengenali berbagai kebutuhan masyarakat yang nantinya dituangkan ke dalam agenda dan prioritas program, serta untuk mengembangkan program-program yang telah ada sehingga program-program tersebut mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat. Responsivitas juga secara langsung menggambarkan bagaimana kemampuan organisasi dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Dwiyanto 2006: 51). Responsivitas secara singkat dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan suatu organisasi dalam mengenali berbagai kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki tingkat kepekaan yang tinggi ditunjukkan dengan kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam melakukan upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika mendapat pujian dari masyarakat. Pujian tersebut menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar bisa dengan sigap ikut terjun langsung menangani kasus narkotika yang ada di Kota Denpasar. Masyarakat sebagai acuan program rehabilitasi sosial ini merasa puas terhadap pelayanan yang di berikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar karena masyarakat merasa respon Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar cukup baik ketika menerima laporan yang ada di masyarakat. Namun, terkadang jika penanganan dan pembinaan yang di berikan sedikit terlambat hal ini di karenakan alur komunikasi dari Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar ke masyarakat masih melalui orang ketiga yaitu pihak berwajib.

Dapat disimpulkan bahwa responsivitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dapat dikatakan cukup baik karena Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar terkait bisa cepat tanggap terhadap permasalahan yang sedang tumbuh di masyarakat. Namun, perlu adanya peningkatan komunikasi yang baik dari dinas dengan pihak ketiga atau lembaga masyarakat.

Responsibilitas

Menurut Lenvina dalam Dwiyanto (2006:51), bahwa responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu di lakukan sesuai dengan kebijakan organisasi. Dalam hal ini kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika melalui program rehabilitasi yang di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 12 Tahun 2022 mengenai pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Adapun pelaksanaan program rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar pada umumnya mengacu pada prinsip-prinsip administrasi serta kebijakan yang ada. Hampir semua program kerja yang di jalani oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar berjalan sesuai dengan SOP serta aturan yang di tetapkan pada saat itu. Selain bekerja serta menjalankan program sesuai dengan SOP yang berlaku, Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar juga terus melakukan transparansi dan juga evaluasi terhadap keuangan serta pelaksanaan kegiatan sehingga jika nantinya terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak di inginkan, maka di program-program selanjutnya kesalahan tersebut dapat di netralisir. Sehingga dapat di simpulkan bahwa responsibilitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika di Kota Denpasar dapat di katakana cukup baik.

Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas merujuk pada seberapa besar suatu kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik tersebut konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi jika kegiatan tersebut dianggap benar dan sesuai dengan nilai serta norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dimana hal ini berarti bahwa pihak pemberi pelayanan sudah dapat mempertanggungjawabkan pelayanan yang dilakukan dengan cukup baik.

Laporan kasus pengguna narkotika di Kota Denpasar dan laporan pertanggung jawaban sudah berjalan dengan baik. Selain itu laporan transparansi dana di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika di Kota Denpasar. Selain melakukan pelaporan pertanggungjawaban dan keuangan, dinas terkait juga melakukan evaluasi kinerja jika ada hasil dari pelaporan tersebut yang masih dirasa kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar melalui program rehabilitasi sudah berjalan dengan baik.

Faktor Pendukung Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika di Kota Denpasar

Pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika melalui program rehabilitasi di kota Denpasar akan berjalan baik jika didukung faktor-faktor yang mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja suatu organisasi. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai faktor pendukung kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika melalui program rehabilitasi di Kota Denpasar, yaitu:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam menunjang pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika
2. Evaluasi yang diberikan Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar terhadap program-program yang digunakan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika
3. Anggaran atau dana yang diperuntukan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika

Beberapa penjelasan tersebut merupakan faktor pendukung yang bertujuan untuk mempermudah kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika di kota Denpasar, sehingga dengan adanya faktor-faktor pendukung tersebut Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dapat melaksanakan kinerjanya lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan program kerja yang berjalan tentu semua faktor-faktor ini akan digunakan dan seluruh faktor yang ada juga harus memiliki alur pertanggungjawaban yang jelas sehingga nantinya ketika seluruh program kerja di jalankan dengan faktor pendukung yang lengkap, sudah jelas kemana saja alur pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Sehingga nantinya ketika sebuah kebijakan terdapat kesalahan, lebih mudah untuk memperbaiki karena kebijakan tersebut memiliki pertanggung jawaban serta alur yang jelas.

Faktor Penghambat Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika di Kota Denpasar

Pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika terasa kurang optimal jika terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Berikut penjelasan mengenai faktor penghambat kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika di Kota Denpasar, yaitu

1. Kurangnya sumber daya manusia yang ada dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika dan masih ada sumber daya manusia yang mengambil pekerjaan yang lebih dari satu pekerjaan yang menyebabkan kinerja yang diciptakan kurang maksimal
2. Kesadaran masyarakat atau dari pengguna narkotika itu sendiri karena jika pengguna narkotika tersebut kedapatan menggunakan narkotika tetapi saat di laporkan pihak keluarga dan tidak mau di rehabilitasi maka pengguna tersebut mendapat perlindungan hak asasi manusia yang menyebabkan menghambat kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar
3. Keterbatasan anggaran Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Beberapa penjelasan tersebut merupakan faktor-faktor penghambat kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika di Kota Denpasar

Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Pelaksanaan penelitian terkait kinerja Badan Narkotika Nasional dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika di Kota Denpasar melalui program rehabilitasi telah berjalan dengan cukup baik, namun ditemukan beberapa hal yang harus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Dengan demikian diperlukan adanya peningkatan kinerja agar pemberantasan dan penanggulangan dapat berjalan lebih optimal dan mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika di Kota Denpasar

1. Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar perlu melakukan perekrutan petugas atau tenaga kerja yang ada. Karena petugas atau tenaga kerja yang ada sekarang tidak sesuai dengan banyaknya masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Hal ini sangatlah disayangkan, mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan aspek paling penting dalam menjalankan program demam berdarah yang ada. Agar dapat menjalankan program secara optimal.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Baik sosialisasi secara langsung ataupun sosialisasi melalui sosial media. Karena banyak masyarakat yang masih belum mengetahui adanya program rehabilitasi ini serta banyak masyarakat yang mengharapkan program ini di tingkatkan lagi
3. Mengoptimalkan kinerja pegawai sehingga dapat mempertanggung jawabkan program-program yang dicanangkan untuk pengguna narkotika di Kota Denpasar. Sehingga dapat juga meningkatkan komunikasi antara masyarakat dengan dinas secara langsung tidak hanya mengandalkan pihak ketiga sebagai pihak pemberi informasi.

4. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar Dalam Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika Di Kota Denpasar berjalan cukup baik, namun masih belum optimal. Berikut kesimpulan yang dapat di tarik dari indicator kinerja, antara lain:

1. Indikator produktivitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika melalui program rehabilitasi di Kota Denpasar dapat di ketahui dari kesesuaian antara hasil yang di peroleh dengan target yang telah di tetapkan sebelumnya oleh Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar. Dari target-target yang di tentukan, hanya satu target yang tercapai yaitu program kerja rehabilitasi sosial pengguna narkotika di Kota Denpasar. Sedangkan target yang belum tercapai yaitu penurunan pengguna narkotika yang melalui sosialisasi ke masyarakat.
2. Indikator kualitas layanan Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika melalui program rehabilitasi masih belum optimal karena kurangnya sumber daya manusia sebagai penggerak program.
3. Indikator responsivitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika di Kota Denpasar dapat di katakana cukup baik, namun masih perlu di tingkatkan. Hal ini dibuktikan dari adanya respon terhadap permasalahan narkotika di masyarakat dan masyarakat merasa sangat terbantu karena adanya campur tangan dari Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar.
4. Indikator tanggungjawab Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial pengguna narkotika melalui program rehabilitasi di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik. Karena dalam setiap perjalanan program yang di lakukan Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar kepada masyarakat tetap bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku.
5. Indikator akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi sosial melalui program rehabilitasi di Kota Denpasar sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban serta ditekankannya transparansi keuangan yang berjalan selama program berlangsung di Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar Dalam Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkotika Di Kota Denpasar melalui program rehabilitasi di Kota Denpasar, maka saran yang dapat di sampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar harus meningkatkan lagi komunikasi dengan pihak ketiga ataupun masyarakat untuk membuat masyarakat bisa lebih aware untuk ikut mengatasi kasus-kasus narkotika yang ada di masyarakat terutama di lingkungan keluarga

2. Perlu adanya penambahan pegawai sehingga setiap program yang dijalankan Badan Narkotika Nasional bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya sehingga setiap program yang berjalan dapat berjalan dengan maksimal serta program yang lain bisa dilakukan dalam kurun waktu berdekatan atau bahkan bersamaan.
3. Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dengan sebaik-baiknya sehingga lebih memudahkan komunikasi antar masyarakat dan dinas tanpa harus lagi melalui orang ketiga.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto, d. (2017). Reformasi Birokrasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agustino, L. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Herdriani, P. L. (2021). Pengaruh Layanan Rehabilitasi Narkotika Terhadap Kualitas Hidup Warga Binaan Permasalahannya Di Lembaga Permasalahannya. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 8.
- I Made Subantara, A. S. (2020). Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Jurnal Preferensi Hukum, 6.
- Moeheriono. (2014). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
- Nurwignyo, Y. Y. (2014). Pelayanan Petugas Badan Narkotika Nasional Untuk Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Kepada Masyarakat Melalui Strategi Informasi Di Kabupaten Sanggau. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014, 20.
- Pasolong, H. (2016). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Ratmino, A. d. (2005). Manajemen Pelayanan Disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter Dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruky, A. S. (2006). Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Gramedia utama.
- Satori, D. d. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sembiring, M. (2012). Budaya dan Kinerja Organisasi. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Metode R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumber Jurnal atau Penelitian:
- Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Uno, H. B. (2012). Teori Kinerja dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi aksara.